

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan Ekonomi adalah suatu permasalahan mendasar yang sering dihadapi setiap negara dalam kebijakan untuk pembangunan ekonomi, selain memiliki target mengejar pertumbuhan ekonomi yaitu untuk aspek pemerataan hasil dari pembangunan ekonomi. Pada sebagian negara pertumbuhan ekonomi yang selalu dijadikan indikator kemajuan ekonomi ini justru malah menyisakan beberapa persoalan. Pada dasarnya sebenarnya masih ada banyak persoalan dan perdebatan di kalangan ekonom untuk mengukur aktivitas perekonomian yang bisa memberi dampak langsung dan juga bisa menggambarkan aktivitas perekonomian secara riil (Prawoto, 2019).

Di negara yang sedang berkembang indikator tersebut terkadang malah menjadikan sebuah dilema antara mementingkan pertumbuhan ekonomi atau bakal terjadinya ketimpangan pendapatan dan kemiskinan (Hidayat, 2017). Istilah pembangunan (*development*) sering dihubungkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Beberapa ahli ekonomi juga menjelaskan pembangunan ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan didalam struktur dan kegiatan ekonomi. Dan dengan bahasa yang lain juga menjelaskan ahli ekonomi tidak selalu tertarik dengan masalah perkembangan pendapatan nasional riil, tetapi juga dengan modernisasi kegiatan ekonomi (Sukirno S. , 2006).

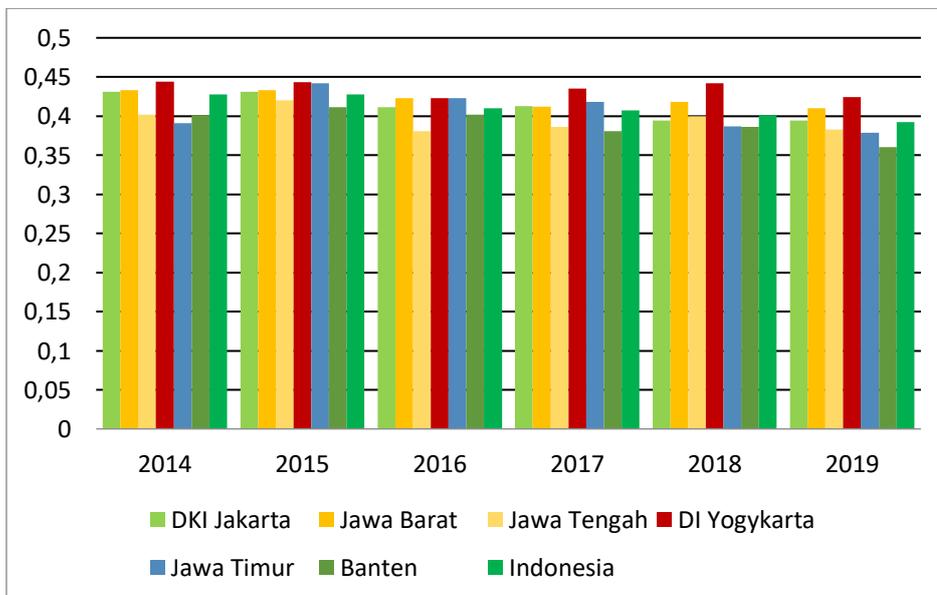
Pembangunan yang sudah berlangsung secara menyeluruh di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentunya sudah menaikkan perekonomian masyarakat. Capaian dan juga hasil-hasil pembangunan yang juga dirasakan oleh masyarakat adalah sebuah agregat pembangunan dari 5 kabupaten/kota di Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta yang juga tidak terlepas dari usaha dan kerja keras secara bersama antara masyarakat dan pemerintah. Potensi dan kekayaan alam daerah ini bisa dilihat sebagai keunggulan yang komparatif bagi daerah, akan tetapi disisi lain banyak kendala yang masih dialami seperti sumber daya manusia dan juga modal untuk memanfaatkan potensi tersebut yang dihadapi oleh penentu kebijakan entah dari tingkat provinsi maupundaerah kabupaten/kota. Akibat dari kondisi perekonomian yang belum mencapai tingkat pemerataan pendapatan yang sama, masih ditemukannya kekurangan yaitu adanya kesenjangan antar wilayah kabupaten/kota dalam mencapai tingkat perekonomian (Hartini, 2017).

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.

Dalam mengukur distribusi ketimpangan pendapatan yang terjadi antar masyarakat adalah dengan melihat dari indeks gini (gini ratio). Dalam indeks gini yaitu memiliki kisaran 0-1. Ketika indeks gini mendekati 0 berarti menandakan ketimpangan semakin rendah (merata), akan tetapi apabila mendekati angka 1 berarti menandakan jika ketimpangan antar masyarakat tinggi dan semakin melebar. (yogyakarta.bps.go.id).

Diagram 1. 1
Gini Ratio Menurut Provinsi di Pulau Jawa



Sumber : BPS RI 2020

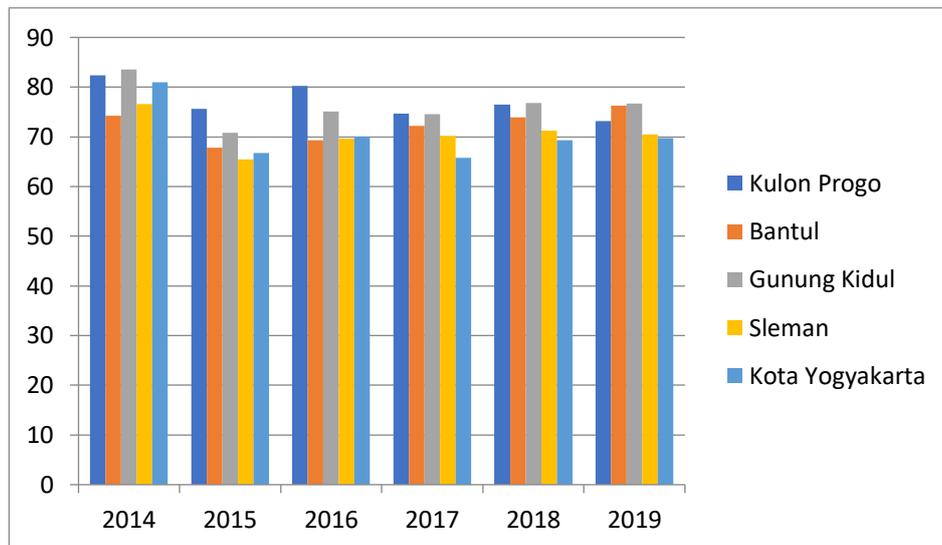
Dapat dilihat dari diagram 1.1 nilai dari *gini ratio* 2018 dan 2019 yang tertinggi terletak di Provinsi DI Yogyakarta yaitu tahun 2018 sebesar 0,442 dan adapun yang terendah adalah Provinsi Banten yaitu 0,360. Tabel diatas juga menunjukkan ada tiga Provinsi yang memiliki nilai *gini ratio* di atas angka nasional

pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,401, yang tertinggi adalah Provinsi DI Yogyakarta (0,442), Jawa Barat (0,410), dan DKI Jakarta (0,394).

Untuk meningkatkan suatu kesejahteraan dalam pendapatan masyarakat di suatu daerah, bisa dilihat melalui hasil output pada pembangunan daerah yang ada didalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Sasana, 2009). PDRB bisa juga dilihat dari kemampuan suatu daerah bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam yang dimilikinya. Sedangkan PDRB perkapita bisa dihitung dengan PDRB harga konstan dengan jumlah penduduk yang ada di suatu wilayah. (Arif A. A., 2018).

PDRB mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang sedang bekerja mengasumsikan bahwa ketika nilai dari PDRB itu naik, maka otomatis jumlah nilai tambah dari barang dan jasa ekonomi di wilayah tersebut juga akan naik. Hal inilah yang nantinya akan menyebabkan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Arthur Lewis juga menjelaskan, bahwa semua sektor dari perekonomian itu harus tumbuh secara bersamaan guna mempertahankan keseimbangan antara industri dan pertanian secara tepat, yaitu dengan mengalihkan kelebihan dari sektor tenaga kerja pertanian ke sektor industri. Peningkatan dari permintaan tenaga kerja ini berasal dari ekspansi kegiatan sektor modern. (Jhingan, 2010).

Diagram 1. 2
TPAK Provinsi D.I Yogyakarta Menurut Kab/Kota
Tahun 2012-2019



Sumber : BPS DIY (2020)

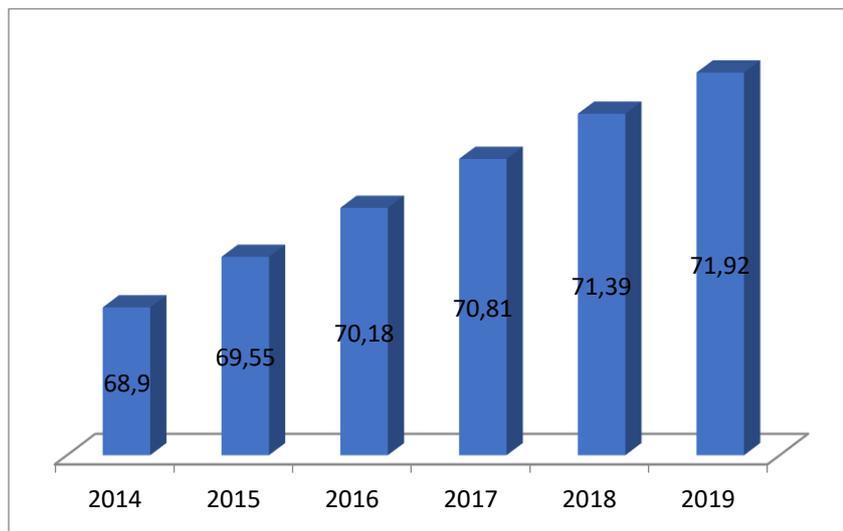
Bisa dilihat dari diagram di atas bahwa TPAK pada tahun 2019 yang tertinggi adalah kabupaten Bantul yaitu sebesar 76,31% dan yang terendah adalah Kota Yogyakarta sebesar 69,75%. Analisis antara angkatan dengan kondisi perekonomian sangatlah menarik untuk dilakukan, karena biasanya tingkat dan pola partisipasi angkatan kerja bergantung terhadap ketersediaan kesempatan kerja dan juga perbedaan pada tuntutan untuk memperoleh pendapatan antar kelompok penduduk. Selain keuangan daerah, modal yang penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yaitu sumber daya manusia. Partisipasi yang aktif oleh masyarakat itulah yang nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut yang juga bisa dilihat melalui tingkat partisipasi angkatan kerja. (Wiratno, 2009).

Di berbagai negara sudah menerapkan sistem pengupahan dengan kebijakan upah minimum. Kebijakan tersebut bisa dilihat melalui dua sisi, yang mana upah minimum adalah alat proteksi bagi pekerja guna untuk mempertahankan supaya upah yang diterima tidak menurun, agar para pekerja bisa memenuhi kebutuhan hidup, hal lainnya upah minimum ini bisa digunakan sebagai alat proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan produktivitas pekerja (Simanjuntak, 1992). Apabila upah yang telah diterima pekerja itu rendah, maka akan berdampak kepada menurunnya produktivitas para pekerja karena nantinya kebutuhan hidup tidak terpenuhi. Disisi lain rendahnya upah bisa mengakibatkan pekerja kehilangan semangat untuk bekerja dan akan merasa kurangnya dihargai sehingga loyalitasnya terhadap perusahaan dimana ia bekerja juga akan menurun (Maulidina M. A., 2018).

Yogyakarta bisa disebut dengan daerah yang selalu menjadi tujuan berwisata, dan memiliki potensi yang tinggi dan maju. Dikarenakan sumberdaya yang melimpah dan juga strategis biasanya di dimanfaatkan untuk berinvestasi, akan tetapi investasi yang tidak merata justru menimbulkan dampak terhadap kesenjangan dan penyediaan lapangan kerja di Yogyakarta (Hartini, 2017). Harrod-Domar dalam (Asryad, 1997) pembentukan dari modal/investasi adalah faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan atau penurunan investasi yang saling berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi bisa menjadi salah satu faktor yang memicu ketimpangan pendapatan antar daerah. Pembangunan ekonomi disuatu daerah bisa dikatakan berhasil apabila bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi dan juga taraf hidup masyarakat yang merata, hal

ini biasa disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tinggi rendahnya IPM yang akan mengakibatkan dampak terhadap tingkat produktivitas penduduk, ketikan IPM menurun maka tingkat produktivitas penduduk juga akan menurun dan hal itulah yang nantinya akan berdampak pada pendapatan yang rendah (Hartini, 2017).

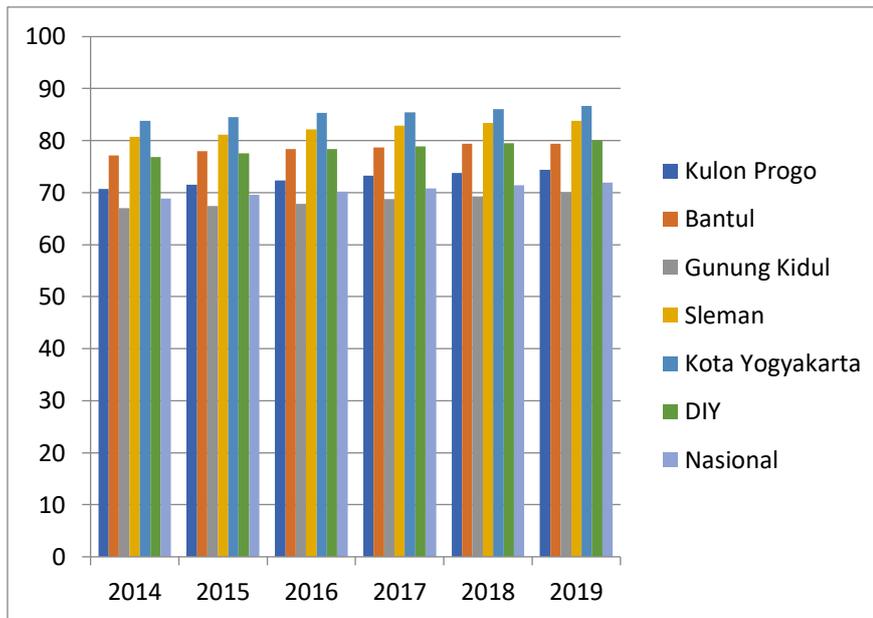
Diagram 1. 3
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia



Sumber : BPS Indonesia

Pada data di atas bisa dilihat data yang diperoleh dari Badan Pusat statistik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang juga biasa dikenal dengan *Human Development Indeks (HDI)* di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2019, angka IPM naik sebesar 71,92 , IPM indonesia naik sedikit lebih cepat dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu 70,81.

Diagram 1. 4
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kab/Kota Di D.I Yogyakarta
Tahun 2014-2019



Sumber : BPS DIY (2020)

Dapat dilihat dari tabel di atas, IPM tertinggi yaitu Kota Yogyakarta sebesar 86,55 persen sedangkan IPM terendah terjadi di kabupaten Gunung Kidul yang baru mencapai 69,96 persen. IPM Daerah Istimewa Yogyakarta masih berada di atas IPM nasional. IPM D.I Yogyakarta pada tahun 2019 mencapai 79,99 persen sedangkan tingkat nasionalnya sendiri sebesar 71,92 persen.

Ketimpangan yang terjadi di suatu wilayah akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Indeks pembangunan manusia dan ketimpangan pendapatan memiliki hubungan yang saling berkaitan (Astuti, 2015) menyatakan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di DIY. Hal ini juga dikarenakan usia harapan hidup yang tinggi bisa menyebabkan usia non-produktif di provinsi DIY, sehingga dapat memicu terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan.

Bedasarkan uraian diatas, menurut World Bank bisa diketahui bahwa ketimpangan ekonomi merupakan permasalahan yan cukup kompleks. Ketimpangan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, tetapi bisa dipengaruhi oleh banyak faktor dan pada umumnya faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Merujuk pada latar belakang, maka penulis ingin menganalisis lebih dalam “ **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten / Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019** ” dengan rumusan masalah sebagai berikut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh Tingkat Partisipasi angkatan Kerja (TPAK) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I Yogyakarta?
3. Bagaimana pengaruh laju pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I Yogyakarta?
4. Bagaiman pengaruh Indeks Pembanguna Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Kabupaten terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I Yogyakarta
2. Untuk mengetahui pegaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I Yogyakarta

3. Untuk mengetahui pengaruh laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi D.I Yogyakarta
4. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

a. Untuk Mahasiswa

Penulisan ini bisa dijadikan untuk bahan acuan bagi penulisan selanjutnya, sehingga mahasiswa lebih mudah dalam menemukan referensi yang tepat dengan judul yang nanti akan diolah. Selain itu juga mahasiswa bisa lebih mudah dalam mengoptimalkan hasil penelitian yang nantinya akan diambil dari kekurangan didalam penulisan ini.

b. Untuk Masyarakat

Masyarakat yang menyimak penulisan ini dengan baik nantinya akan mengetahui alasan jumlah pengangguran yang berfluktuasi, sehingga diharapkan dapat membanggung semangat untuk membuka peluang usaha yang lebih luas lagi dan selanjutnya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

c. Untuk Pemerintah

Melalui penulisan ini pemerintah bisa diharapkan lebih mudah untuk melihat dan membuka mata dalam menyikapi permasalahan ekonomi yang muncul di negara Indonesia yang selanjutnya bisa membuat kebijakan yang bermanfaat bagi bangsa